



Katalog BPS : 3206001.3471

GINI RASIO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013



**KERJASAMA
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA YOGYAKARTA
DENGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA YOGYAKARTA**



Katalog BPS : 3206001.3471

GINI RATIO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013

**KERJASAMA
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA
YOGYAKARTA
DENGAN PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA YOGYAKARTA**

GINI RATIO KOTA YOGYAKARTA 2013

I S B N : 978-602-70633-7-2
Nomor Publikasi : 34710.14.23
No. Katalog : 3206001.3471
Ukuran Buku : 18 cm x 25 cm

Naskah
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik
Kota Yogyakarta

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Buku Gini Rasio Kota Yogyakarta tahun 2013 merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. Publikasi ini menyajikan informasi distribusi pendapatan yang disertai dengan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta serta berbagai pihak atas terwujudnya penerbitan publikasi ini. Hal ini berkat kerjasama antara Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dengan Bappeda Kota Yogyakarta serta bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa publikasi ini masih banyak terdapat kekurangan, karenanya kritik dan saran perbaikan sangat diharapkan.

Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan bagi pengguna data, baik instansi pemerintah maupun masyarakat pada umumnya

Yogyakarta, Agustus 2014

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA YOGYAKARTA
KEPALA,

Drs HARJANA
NIP. 19631026 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Manfaat.....	4
1.4 Sumber data.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II METODE ANALISIS.....	7
2.1 KurvaLorenz.....	7
2.2 Gini Rasio	9
2.3 Kriteria Bank Dunia.....	11
BAB III PEMBAHASAN.....	14
3.1 Pola Komsumsi.....	15
3.2 Kurva Lorenz.....	17
3.3 Gini Rasio.....	18
3.4 Kriteria Bank Dunia.....	20
BAB IV PENUTUP.....	22
DAFTAR PUSTAKA.....	24
LAMPIRAN.....	25

DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	Halaman
1. Prosentase Kelompok Pengeluaran menurut Kelompok Barang Di Kota Yogyakarta Tahun 2013.....	16
2. Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013.....	19
3. Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia menurut Kelompok Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2011–2013.....	21

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>	Halaman
1. Kurva Lorenz.....	8
2. Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2012 dan 2013.....	18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

	Halaman
1 Perhitungan Gini Ratio Berdasarkan Pendapatan Penduduk Tahun 2013.....	26
2 Perhitungan Tingkat Ketimpangan Menurut Kriteria Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2013.....	27
3 Perhitungan Gini Ratio Berdasarkan Pendapatan Penduduk Tahun 2012.....	28
4 Perhitungan Tingkat Ketimpangan Menurut Kriteria Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2012.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi pembangunan yang dianut pemerintah kita adalah trilogi pembangunan, dengan pengertian bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu pada ketiga unsur, yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Ketiga unsur tersebut harus bergerak maju secara selaras, seimbang dan saling mendukung.

Dalam pembangunan saat ini, kedua unsur trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dirasakan sudah cukup berhasil, karenanya masalah pemerataan pembangunan menjadi isu nasional yang cukup hangat. Sehubungan dengan hal tersebut, prioritas untuk memerangi kemiskinan dengan cara mencari/mengamati kantong-kantong kemiskinan telah dilakukan secara serius dan terpadu, sehingga komitmen pemerintah untuk menghapus penduduk miskin akan dapat terwujud.

Selain itu tujuan pembangunan nasional tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga telah memberikan penekanan dengan bobot yang sama kepada aspek peningkatan tingkat pendapatan masyarakat dan aspek pemerata.

Kesenjangan pembangunan secara umum selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk dan aspek. Bukan saja berupa kesenjangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan per kapita, tetapi juga kesenjangan dalam proses distribusinya. Bukan pula semata-mata berupa kesenjangan antardaerah, akan tetapi juga berupa kesenjangan ekonomi dalam lapisan masyarakat yang ada. Dari segi normatif, upaya untuk mengurangi kesenjangan merupakan salah satu tujuan pembangunan yang harus dicapai, terlebih bagi pemerintah yang saat ini perannya semakin strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat lokal selain karena adanya penguatan peran pemerintah daerah berbagai konsekuensi logis dari penerapan otonomi yang tengah berlangsung saat ini.

Semangat otonomi daerah yang dinaungi oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberi nuansa baru dalam pembangunan daerah. Setiap daerah, berlomba meningkatkan daya saing daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan daerah. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan daerah merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan daerah yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila (Kartasmita, G, 1996).

Ada berbagai cara untuk mengetahui prestasi pembangunan suatu daerah salah satunya dengan pendekatan ekonomi yaitu berdasarkan tinjauan aspek pendapatan. Dalam aspek pendapatan digunakan konsep pendapatan perkapita, namun hal tersebut belum cukup untuk menilai prestasi pembangunan karena tidak mencerminkan bagaimana pendapatan sebuah daerah terbagi di kalangan penduduknya, sehingga tidak memantau unsur keadilan atau pemerataan, untuk itu diperlukan adanya data mengenai pemerataan distribusi pendapatan.

Masalah ketimpangan pendapatan, atau lebih populer disebut kesenjangan, baik antar individu, antar kelompok, antar sektor maupun antar daerah perlu mendapat penanganan segera karena akan berdampak negatif baik terhadap stabilitas politik maupun stabilitas ekonomi. Peran besar Pemerintah dalam pengalokasian dana pembangunan untuk pelayanan publik, diantaranya bagi sektor pendidikan dan kesehatan, telah memungkinkan berkurangnya masalah kemiskinan yang merupakan salah satu "cacat" dalam keberhasilan pembangunan ekonomi selama ini (Priyono Tjiptoherijanto, 2004).

Disamping kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah pembangunan dan tujuan utama kebijakan pembangunan, kemiskinan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin lebar kesenjangan pendapatan orang kaya dan orang miskin. Bila

kondisi seperti ini yang terjadi di suatu daerah, berarti pembangunan yang dilaksanakan lebih berpihak kepada segelintir orang kaya, sedangkan orang miskin tidak menikmatinya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Banyak ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Namun pada kajian ini dibatasi pada ukuran ketimpangan distribusi pendapatan dengan ukuran kuantitatif yang digambarkan dalam Kurva Lorenz, Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia yang umum digunakan karena keterbatasan data yang tersedia. Ukuran-ukuran tersebut merupakan ukuran besar kecilnya bagian pendapatan yang diterima oleh penduduk. Disamping ukuran ketimpangan distribusi pendapatan, kajian ini juga dimaksudkan melihat kondisi kemiskinan penduduk dengan metode Garis Kemiskinan Yogyakarta.

Kajian ini bertujuan untuk mengamati tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk di daerah Yogyakarta pada tahun 2013, dibandingkan dengan ketimpangan pada tahun sebelumnya.

1.3 Manfaat

Indikator ketimpangan distribusi pendapatan dapat digunakan sebagai bahan untuk menelaah berbagai kemungkinan yang dapat ditawarkan dalam analisis ekonomi untuk

memecahkan persoalan ketimpangan dan kemiskinan. Kajian ini juga dapat digunakan untuk menggali kebijakan alternatif yang akan diterapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan di wilayahnya.

1.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2013. Data mengenai pendapatan rumahtangga/penduduk sangat sulit didapat, untuk itu penghitungan distribusi pendapatan dilakukan dengan pendekatan pengeluaran konsumsi rumahtangga/penduduk yang didapat dari data Susenas. Pengukuran distribusi pendapatan menggunakan pendekatan pengeluaran sebagai proksi pendapatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca mengikuti alur pembahasan, materi dalam buku ini dibagi dalam empat bab. Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang yang mendeskripsikan pendapat para pakar/pengamat ekonomi dalam permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk dan kemiskinan, serta tujuan dan sistematika penulisan. Bab II Metode Analisis, mengupas secara singkat ukuran yang digunakan dan metode yang digunakan, serta paparan teoritis tentang ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Bab III. Pembahasan,

merupakan inti dari publikasi ini, yang menganalisis hasil penghitungan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk berdasarkan Kurva Lorenz, Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia. Bab IV Kesimpulan, berupa kesimpulan atau ringkasan dari hasil analisis masing-masing metode pengukuran.

BAB II

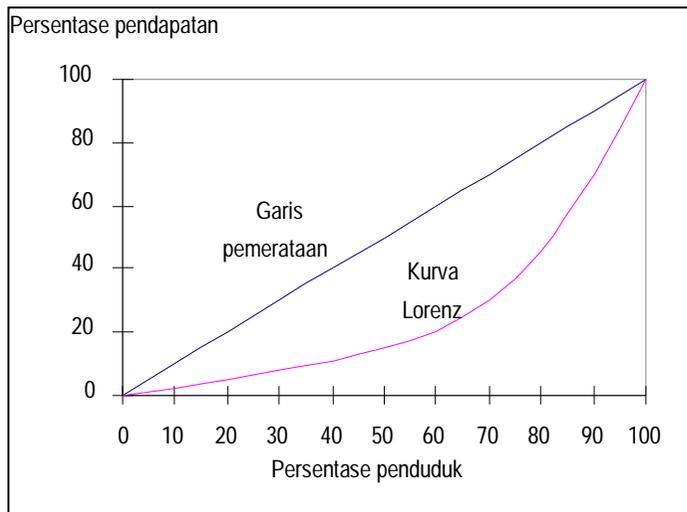
METODE ANALISIS

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah di kalangan penduduknya. Ada beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur pemerataan distribusi pendapatan, diantaranya yaitu :

2.1 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz diambil dari nama Conrad Lorenz, seorang ahli statistik Amerika yang pada tahun 1905 menemukan diagram yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan menurut kelompok-kelompok penduduk yang juga dihitung secara kumulatif. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujursangkar dimana sisi vertikal melambangkan persentase kumulatif pendapatan dan sisi horizontal mewakili persentase kumulatif penduduk sebagai penerima pendapatan.

Gambar 1 : Kurva Lorenz



Penentuan tingkat ketimpangan berdasarkan Kurva Lorenz dilihat dari jarak kurva ini ke garis diagonal. Semakin dekat jarak Kurva Lorenz ke garis diagonal (kurvanya makin menyerupai garis lurus) menyiratkan distribusi pendapatan yang makin merata. Sebaliknya bila kurva semakin jauh dari garis diagonal menunjukkan distribusi pendapatan penduduk yang semakin timpang.

Pembuatan Kurva Lorenz dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengurutkan data pengeluaran dari nilai terkecil hingga terbesar.
2. Menentukan desil pertama hingga ke sepuluh pada distribusi data pengeluaran

3. Menghitung besarnya nilai pendapatan pada masing-masing kelompok desil
4. Menentukan kumulatif pendapatan pada masing-masing kelompok desil.
5. Menghitung persentase kumulatif pendapatan dari masing-masing desil
6. Memetakan dalam plot dua dimensi antara masing-masing desil sebagai sisi horisontal dengan nilai persentase kumulatif pendapatan pada sisi vertikal.

2.2 Gini Rasio (*Gini Ratio*)

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Gini Rasio. Ide dasar perhitungan Gini Rasio sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang kemudian dinamakan Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Secara ilustrasi, luas kurva Lorenz merupakan luas daerah di bawah garis diagonal yang dibatasi dengan kurva pada suatu persegi empat. Perbandingan atau rasio antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Gini Rasio. Secara matematis, untuk menghitung Gini Rasio dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

Keterangan :

P_i = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i

Q_i = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas
pengeluaran ke-i

k = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk.

Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Menurut Oshima, nilai Gini Rasio dibagi menjadi tiga tingkatan. Nilai Gini Rasio kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan yang rendah, nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori moderat, dan nilai lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan yang tinggi.

Secara ringkas penghitungan Gini Rasio adalah sebagai berikut (Lampiran 2):

1. Membuat kelas pengeluaran penduduk berdasarkan data Susenas, diisikan pada kolom (1).
2. Menghitung jumlah penduduk menurut kelompok pengeluaran dan diisikan pada kolom (2).
3. Menghitung persentase jumlah penduduk dan diisikan pada kolom (3).

4. Menghitung nilai pendapatan penduduk pada masing-masing kelompok pengeluaran dan diisikan pada kolom (4).
5. Menentukan kumulatif pendapatan hingga kelas ke-i dan diisikan pada kolom (5).
6. Menghitung persentase kumulatif pendapatan dan diisikan pada kolom (6).
7. Menambahkan kumulatif pendapatan pada kelompok pengeluaran ke-i dengan kelompok pengeluaran ke-(i-1) dan diisikan pada kolom (7).
8. Mengalikan nilai pada kolom (3) dengan kolom (7) dan diperoleh nilai pada kolom(8).
9. Menjumlahkan seluruh nilai pada kolom (8) dan dibagi dengan 10.000
10. Nilai Gini Rasio diperoleh dengan mengurangi angka satu dengan nilai perhitungan pada langkah ke-9.

2.3 Kriteria Bank Dunia

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Ukuran ini membagi penduduk menjadi tiga kelompok pendapatan yakni kelompok 40 persen berpendapatan terendah, 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi.

Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh

40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dengan batasan sebagai berikut :

- 2.3.1 Tingkat ketimpangan rendah jika 40 % penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan.
- 2.3.2 Tingkat ketimpangan moderat jika 40 % penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 hingga 17 persen jumlah pendapatan.
- 2.3.3 Tingkat ketimpangan tinggi jika 40 % penduduk berpendapatan terendah menerima kurang 12 persen jumlah pendapatan.

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan ukuran ketimpangan pendapatan berdasarkan Kriteria Bank Dunia sebagai berikut :

1. Mengurutkan data pengeluaran dari terkecil hingga terbesar.
2. Menentukan nilai desil ke-4 dan ke-8 pada distribusi data pengeluaran.
3. Nilai pengeluaran yang kurang dari desil ke-4 dikelompokkan sebagai penduduk berpendapatan terendah, nilai antara desil ke-4 hingga 8 masuk pada kelompok moderat dan nilai pengeluaran diatas desil ke 8 masuk dalam kategori berpendapatan tertinggi.
4. Menghitung jumlah penduduk dan nilai pengeluaran pada masing-masing kelompok sebagaimana kriteria pada langkah ke-3.

5. Menghitung persentase pendapatan pada masing-masing kelompok.
6. Menentukan tingkat ketimpangan berdasarkan kriteria Bank Dunia yang difokuskan pada kelompok 40 % penduduk berpendapatan terendah.

BAB III

PEMBAHASAN

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak daerah otonom. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari kemiskinan. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi sosial yang dampaknya cukup negatif. Oleh karena itu pembangunan yang dilakukan diharapkan tidak hanya untuk mencapai target tingkat pertumbuhan, tetapi juga menghasilkan pemerataan bagi masyarakat.

Kemiskinan berkaitan erat dengan kemampuan mengakses pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Oleh karenanya diperlukan informasi yang jelas tentang pola konsumsi masyarakat terutama melalui peningkatan akses terhadap informasi tentang permasalahan ini.

Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Semakin kecil pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan Makanan

berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Di banyak wilayah yang sedang berkembang, pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama, karena untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Rata-rata pengeluaran perkapita didapat dengan membagi jumlah seluruh pengeluaran rumah tangga baik makanan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lainnya dengan jumlah anggota rumah tangga keseluruhan. Rata-rata pengeluaran perkapita dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga yang bersangkutan.

3.1 Pola Konsumsi

Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Tabel 1. Prosentase Kelompok Pengeluaran menurut Kelompok Barang di Kota Yogyakarta Tahun 2013

Kelompok Pengeluaran	Kelompok Barang	
	Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)
< 399.999	63,40	36,60
400.000 - 499.999	63,34	36,66
500.000 - 599.000	56,68	43,32
600.000 - 799.999	53,21	46,79
800.000 - 999.999	55,91	44,09
1.000.000 - 1.499.999	42,99	57,01
1.500.000 - 1.999.999	36,11	63,89
2.000.000 - 2.499.999	30,07	69,93
> 2.500.000	16,41	83,59
TOTAL	38,52	61,48

Sumber : Susenas 2013, diolah

Kelompok pengeluaran terbesar untuk jenis pengeluaran makanan terjadi pada kelompok pengeluaran < 399.999 rupiah sebanyak 63,40 persen, sedangkan untuk jenis pengeluaran non makanannya sebanyak 36,60 persen. Untuk kelompok pengeluaran 800.000 – 999.999 rupiah hampirimbang antara

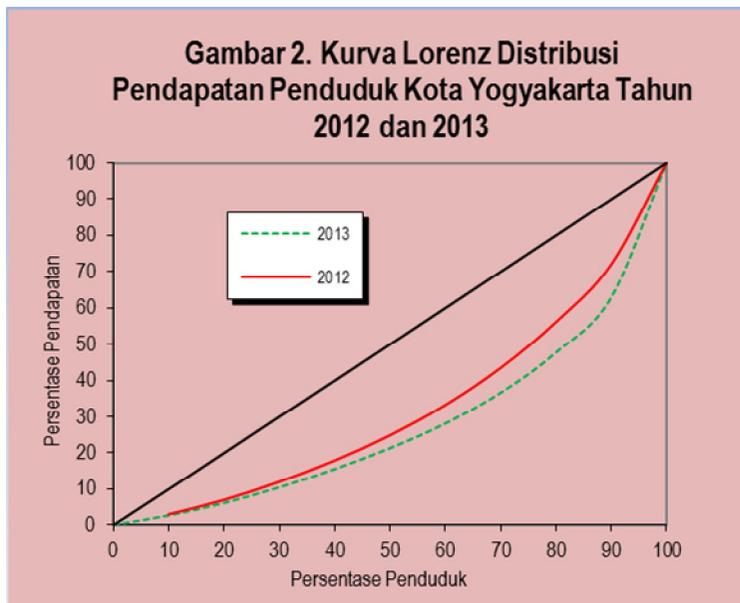
kelompok pengeluaran untuk makanan dan non makanannya yaitu sebanyak 55,91 persen dan 44,09 persen. Demikian juga untuk kelompok pengeluaran sebelum dan sesudahnya. Pada kelompok pengeluaran 600.000 – 799.999 rupiah sebanyak 53,21 persen untuk makanan dan 46,79 persen untuk non makanannya. Kemudian pada kelompok pengeluaran 1.000.000 – 1.499.999 rupiah sebanyak 42,99 persen untuk makanan dan 57,01 persen untuk non makanan.

Secara umum total pengeluaran perkapita di Kota Yogyakarta pada tahun 2013 lebih banyak digunakan untuk konsumsi non makanan. Persentase pengeluaran perkapita untuk konsumsi makanan sebanyak 38,52 persen dan 61,48 persen untuk konsumsi non makanan. Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa semakin tinggi kelompok pengeluaran perkapita nya, prosentase untuk jenis pengeluaran makanan semakin rendah dibanding dengan non makanan. Di Kota Yogyakarta dengan kelompok pengeluaran perkapita di bawah 1.000.000 rupiah, komposisi pengeluarannya lebih banyak di gunakan untuk memenuhi kebutuhan makanannya, sedangkan untuk pengeluaran perkapita di atas 1.000.000 rupiah, lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanannya.

3.2 Kurva Lorenz

Pergeseran yang terjadi pada Kurva Lorenz tidak cukup signifikan, sehingga pola yang tampak pada Gambar 2 menunjukkan bahwa pendapatan penduduk Kota Yogyakarta

yang diukur melalui pengeluaran per kapita tahun 2013, memberikan gambaran bahwa tingkat pemerataan pendapatan dari penduduk Kota Yogyakarta tidak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang terindikasikan Kurva Lorenz di tahun 2012 bergeser sedikit jaraknya ke garis diagonal yang menyiratkan bahwa distribusi pendapatan masih merata.



Mengingat bahwa Kurva Lorenz tidak menunjukkan suatu nilai kuantitatif, maka seberapa besar pergeseran kurva tersebut tidak terukur. Ukuran secara kuantitatif akan dijelaskan pada subbab berikutnya, yaitu dengan indikator Gini Rasio.

3.3 Gini Rasio (*Gini Ratio*)

Visualisasi dengan Kurva Lorenz menjelaskan distribusi pendapatan penduduk tanpa memberikan nilai kuantitatif yang dapat dibandingkan. Dengan Gini Rasio, ukuran tinggi atau

rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif, lebih terbandingkan.

Tabel 2. Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013

Uraian	Tahun		
	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Gini Rasio	0,3509	0,3603	0,4366
Kriteria	Moderat	Moderat	Moderat

Sumber : Susenas 2013, diolah

Pada tahun 2013, Gini Rasio Kota Yogyakarta tercatat 0,4366, lebih tinggi 0,0763 poin dibanding dengan Gini Rasio pada tahun 2012. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2013 lebih tidak merata dibanding tahun 2012.

Pada Tabel 2, menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan penduduk kota Yogyakarta dari tahun 2011 sampai dengan 2013 di atas 0,3 artinya bahwa Kota Yogyakarta termasuk wilayah yang ketimpangan pendapatannya termasuk dalam kriteria moderat. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta belum bisa dinikmati secara merata oleh penduduk..

3.4 Kriteria Bank Dunia

Pemerataan pendapatan masyarakat, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, padahal pengamatan mengenai fenomena tersebut sangat diperlukan, sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut Kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk terendah memperoleh : kurang dari 12 persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan dikatakan buruk (tingkat ketimpangan tinggi); antara 12 persen sampai dengan 17 persen dikatakan berketimpangan sedang; lebih dari 17 persen berketimpangan rendah.

Kelompok yang menjadi fokus dalam penghitungan berdasar Kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok ini menunjukkan distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.

Pada tahun 2013 kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah di Kota Yogyakarta menikmati 15,57 persen pendapatan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia bagian pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah ini tergolong sedang, sehingga termasuk pada kategori ketimpangan sedang (moderate inequality). Jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun

sebelumnya yaitu pada tahun 2012, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah menikmati bagian pendapatan yang lebih tinggi, yaitu 17,97 persen.

Tabel 3. Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia menurut Kelompok Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2011 – 2013

Kelompok Penduduk	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
40% Penduduk berpendapatan Terendah	18,2	17,97	15,57
40% Penduduk Berpendapatan Menengah	39,45	38,34	32,16
20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi	42,36	43,68	52,27

Sumber: Susenas 2013, diolah

Meskipun begitu, 40 persen penduduk lapisan sedang/menengah dan 20 persen penduduk lapisan atas/tinggi masih menerima pembagian pendapatan relatif lebih tinggi dibandingkan 40 persen penduduk terendah. yaitu berkisar antara 32,16 persen sampai dengan 52,27 persen dari total pendapatan.

Dampak kemajuan pembangunan lebih dirasakan untuk penerima pendapatan kelompok sedang dan tinggi. Idealnya untuk kelompok penerima pendapatan sedang dan tinggi mampu mentransfer ke kelompok penerima pendapatan rendah sehingga akan lebih merata.

IV. PENUTUP

1. Pola Konsumsi Penduduk Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi makanan.
2. Dengan menggunakan Kurva Lorenz terlihat bahwa ketimpangan distribusi pendapatan penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2013 mengalami perubahan tingkat ketimpangan pendapatan kearah yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2012.
3. Dengan ukuran Gini Rasio diperoleh bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kota Yogyakarta semakin tidak merata pada tahun 2013, yaitu dengan nilai mencapai 0,4366.
4. Pada tahun 2013 kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah di Kota Yogyakarta menikmati 15,57 persen pendapatan atau termasuk dalam kategori ketimpangan sedang (moderat inequality). Oleh karena lebih rendah daripada bagian pendapatan yang diterima 40 persen penduduk berpendapatan terendah tahun 2012 yang mencapai 17,97 persen, maka dikatakan distribusi pendapatan penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2013 lebih tidak merata dibandingkan tahun 2012.
5. Beberapa pilihan kebijakan penanggulangan ketimpangan dan kemiskinan yang dikemukakan oleh para ekonom dapat menjadi alternatif dalam perencanaan program Pemerintah Kota Yogyakarta. Diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta

dapat terus memberikan perhatian khusus dalam upaya mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Bukan hanya Pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat juga perlu ikut berperan aktif, agar kaum miskin tidak semakin terpinggirkan, dan apa yang dicita-citakan dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

BPS, “Pola Konsumsi Rumahtangga, Jakarta

BPS, 2004, “Pengeluaran Penduduk, Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan, Jakarta

Dumairy, 1996, “*Perekonomian Indonesia*”, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Priyono Tjiptoherijanto, 1998, Kesenjangan, Jakarta

Rhyme, 2007, “distribuísi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan, Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan Gini Ratio Berdasarkan Pendapatan Penduduk Tahun 2013

Golongan Pendapatan Sebulan	Jumlah Penduduk	Persentase Jumlah Penduduk	Pendapatan (Rupiah)	Kumulatif Jumlah Pendapatan (Rupiah)	Persentase Kumulatif Pendapatan (Yi)	$Y_i + Y_{i-1}$	Kol(3) X Kol(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Desil 1	40.389	10	11.811.824.437	11.811.824.437	2,69	0,02687	0,00269
Desil 2	39.832	10	15.063.117.363	26.874.941.800	6,11	0,08799	0,00870
Desil 3	39.890	10	18.983.585.158	45.858.526.958	10,43	0,16543	0,01639
Desil 4	40.744	10	22.602.582.978	68.461.109.935	15,57	0,26001	0,02631
Desil 5	40.089	10	25.211.813.865	93.672.923.801	21,31	0,36876	0,03671
Desil 6	40.613	10	30.012.612.118	123.685.535.918	28,13	0,49437	0,04986
Desil 7	41.744	10	38.896.575.142	162.582.111.060	36,98	0,65110	0,06750
Desil 8	38.875	10	47.255.638.635	209.837.749.696	47,73	0,84704	0,08177
Desil 9	40.197	10	66.666.342.244	276.504.091.940	62,89	1,10615	0,11042
Desil 10	40.306	10	163.166.071.669	439.670.163.609	100,00	1,62889	0,16304
JUMLAH	402.679	100	439.670.163.609				0,56340

$$\text{Gini Ratio} = 1 - 0,56340$$

$$= 0,43660$$

**Lampiran 2. Perhitungan Tingkat Ketimpangan Menurut
Kriteria Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2013**

Kelompok Penduduk	Persentase Penduduk (%)	Jumlah Pendapatan (Juta Rupiah)	Persentase Pendapatan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Berpenghasilan Rendah	10,00	11.811,82	
	10,00	15.063,12	
	10,00	18.983,59	
	10,00	22.602,58	
	40,00	68.481,11	15,57
B. Berpenghasilan Menengah	10,00	25.211,81	
	10,00	30.012,61	
	10,00	38.896,58	
	10,00	47.255,64	
	40,00	141.376,64	32,16
C. Berpenghasilan Tinggi	10,00	66.666,34	
	10,00	163.166,07	
	20,00	229.832,41	52,27
JUMLAH	100,00	439.670,16	100,00

Keterangan :

40 % penduduk berpenghasilan rendah menerima 12 - 17 % jumlah pendapatan, maka termasuk tingkat ketimpangan sedang

Lampiran 3. Perhitungan Gini Ratio Berdasarkan Pendapatan Penduduk Tahun 2012

Golongan Pendapatan Sebulan	Jumlah Penduduk	Persentase Jumlah Penduduk	Pendapatan (Rupiah)	Kumulatif Jumlah Pendapatan (Rupiah)	Persentase Kumulatif Pendapatan (Yi)	$Y_i + Y_{i-1}$	Kol(3) X Kol(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Desil 1	39.165	9,94	10.775.666.588	10.775.666.588	2,98	0,02985	0,00297
Desil 2	39.496	10,02	14.478.169.647	25.253.836.235	6,99	0,09980	0,01000
Desil 3	39.560	10,04	18.306.101.543	43.559.937.778	12,07	0,19061	0,01914
Desil 4	39.377	9,99	21.332.222.038	64.892.159.816	17,97	0,30040	0,03002
Desil 5	39.427	10,01	25.005.634.934	89.897.794.751	24,90	0,42875	0,04290
Desil 6	39.277	9,97	30.131.359.528	120.029.154.279	33,25	0,58147	0,05796
Desil 7	39.670	10,07	37.115.472.183	157.144.626.462	43,53	0,76774	0,07730
Desil 8	39.832	10,11	46.170.438.401	203.315.064.862	56,32	0,99843	0,10093
Desil 9	38.738	9,83	56.625.447.870	259.940.512.732	72,00	1,28316	0,12616
Desil 10	39.471	10,02	101.087.249.138	361.027.761.871	100,00	1,72000	0,17230
JUMLAH	394.012	100	361.027.761.871				0,63969

$$\text{Gini Ratio} = 1 - 0,63969$$

$$= 0,36031$$

**Lampiran 4. Perhitungan Tingkat Ketimpangan Menurut Kriteria
Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2012**

Kelompok Penduduk	Persentase Penduduk (%)	Jumlah Pendapatan (Juta Rupiah)	Persentase Pendapatan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Berpenghasilan Rendah	10,00	10.775,67	
	10,00	14.478,17	
	10,00	18.306,10	
	10,00	21.332,22	
	40,00	64.892,16	17,97
B. Berpenghasilan Menengah	10,00	25.005,63	
	10,00	30.131,36	
	10,00	37.115,47	
	10,00	46.170,44	
	40,00	138.422,90	38,34
C. Berpenghasilan Tinggi	10,00	56.625,45	
	10,00	101.087,25	
	20,00	157.712,70	43,68
JUMLAH	100,00	361.027,76	

Keterangan :

40 % penduduk berpenghasilan rendah menerima lebih dari 17 % jumlah pendapatan, maka termasuk tingkat ketimpangan rendah



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA YOGYAKARTA**

Jl. Brigjend Katamso Kompleks THR Yogyakarta

Telpon : (0274) 387752